
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Yosua Bantali¹, Hendrik Gamaliel², Stanley Kho Walandow³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus, Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : yosuabantali123@gmail.com

ABSTRACT

The research is to determine whether the financial performance of the Regional Education Office of North Sulawesi Province in 2023 has met the Value for Money requirements. From three elements, namely Economics, Efficiency and Effectiveness. This type of research uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were interviews and documentation. The financial performance results obtained by the Regional Education Office of North Sulawesi Province met the economic requirements, namely 87,48% of 3 main activity programs, for the efficiency ratio the results were 151% inefficient and for the effectiveness ratio the results were effectiveness, namely 100%.

Keywords : Financial Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) mencakup sistem akuntabilitas hukum yang memadai, jelas dan terukur sehingga pengelolaan dan pembangunan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efisien, bersih dan bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan kronisme. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus bekerjasama dalam melakukan pengawasan untuk pemantauan program-program instansi terkait untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program bukan hanya dilihat dari hasil yang dicapai melainkan proses serta dampak yang nantinya ditimbulkan. Pengelolaan sumber daya suatu daerah dalam pencapaian realisasi dengan target perencanaan yang strategis. Dengan melakukan program secara terstruktur sesuai target dapat memudahkan instansi untuk mencapai keberhasilan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan informasi atas kegiatan dan laporan keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Informasi dan pengungkapan kinerja keuangan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan pembangunan yang diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Pelaksanaan program-program yang telah direncanakan merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian kinerja untuk setiap tujuan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tujuan dan pelaksanaan yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja berdasarkan tingkat dan tingkat kinerja merupakan suatu metode pengukuran tingkat kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja sehingga selisih dari realisasi dan target yang telah ditetapkan dapat dinilai menjadi terlaksananya program dan presentasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat berguna dalam memperkirakan tanggung jawab organisasi untuk menciptakan kinerja yang tinggi. Dilakukannya pengukuran kinerja untuk memenuhi tiga maksud yakni untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi, selanjutnya sebagai pembuat keputusan dan jasa yang terakhir untuk mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki organisasi kelembagaan. Salah satu cara dalam penilaian kinerja dapat digunakan dengan cara menggunakan konsep value for money (VfM) yaitu melakukan pengukuran / penilaian suatu kinerja dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio efektifitas, serta rasio ekonomis. Adanya 10 program utama yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, didalamnya terdapat beberapa kegiatan dengan tujuan terselenggaranya layanan pendidikan mewujudkan masyarakat cerdas komprehensif yang mandiri, berdaya saing, berbudaya dan sejahtera. Dari total anggaran Rp.539.047.343.345 yang direncanakan terealisasi 81% dapat dikategorikan baik namun ada sekitar 19% yang tidak terealisasi.

Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan program sudah baik namun masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi terutama dalam program yang telah di anggarkan namun tidak terealisasi yaitu program perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp24.982.000. Sehingga penetapan program terkesan lambat dikarenakan adanya pandemic *covid-19* yang mengharuskan membatasi aktivitas berkerumun. Begitu juga dalam program wajib belajar pendidikan menengah kejuruan siswa miskin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adanya kegiatan penyelenggaraan oprasional sekolah SMK sebesar Rp.348.750.000 yang tidak terealisasi. Dari beberapa program yang tidak terealisasi tentunya memberikan penurunan kinerja di instansi dinas pendidikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dinas pendidikan mengalami penurunan dimana untuk realisasi anggaran tahun 2019 capaian kinerja mencapai 93%. Pada tahun 2020 terjadinya pengalihan anggaran karena terjadi covid-19 yang tentunya mempengaruhi realisasi anggaran. Penilaian kinerja diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap instansi ataupun pegawai didalamnya untuk meningkatkan kinerja secara terstruktur. Dalam menilai kinerja digunakan metode *value for money* yaitu melakukan pengukuran/penilaian suatu kinerja dengan rasio ekonomis, efektifitas serta efisiensi. Sejalan dengan penelitian ini konsep *value for money* penting diterapkan dalam menilai ekonomis, efektifitas serta efisiensi kinerja instansi sektor publik dalam memberikan nilai pada masyarakat terutama bagi peserta didik. *Value for money* bukanlah suatu metode penilaian kinerja yang baru, bahkan metode ini sudah sangat sering digunakan pada banyak penelitian yang mengukur kinerja sektor publik.

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara salah satu instansi pemerintah yang dinaungi oleh pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam memberikan informasi dalam bentuk laporan aktivitas dan kinerja keuangan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan serta mutu pelayanan sektor publik. Dengan menggunakan metode *value for money* akan memberikan manfaat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peserta didik lewat pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK. Begitu juga dengan penyandang kebutuhan khusus yang terus diperhatikan dalam menjamin mutu Pendidikan tujuan dari peneitian ini untuk mengetahui serta menanalisa kinerja keungan berdasarkan konsep *Value for Money* dengan tiga elemen yakni Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah. Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai praktik pemberian jasa untuk memberikan informasi keuangan pada masyarakat dalam proses pencatatan, pengikhtisaran transaksi keuangan masyarakat dan penafsirannya dalam laporan keuangan. Pramudiana (2018:23) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah proses

mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan dan merangkum transaksi dan peristiwa keuangan, menyajikan laporan dan menafsirkan, atau hasil tindakan yang diambil oleh pemerintah, otoritas pusat dan daerah. Lalita (2022) mengemukakan akuntansi pemerintahan adalah keseluruhan proses akuntansi yang dilakukan oleh setiap satuan kerja pemerintah daerah yang menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan sebagai faktor penentu kebijakan perekonomian. Akuntansi publik mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi oleh entitas publik dan organisasi nirlaba lainnya seperti badan amal, yayasan, rumah sakit, serta lembaga pendidikan.

2.2 Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Mulyanto, (2019) sistem yakni kesatuan unsur-unsur yang berkaitan dengan tercapainya suatu tujuan, sehingga dikatakan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang berbentuk fisik dan non fisik yang menunjukkan suatu kumpulan yang saling berkaitan. Halim (2018 : 326) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas ekonomi untuk kepentingan pihak internal dan eksternal entitas ekonomi tersebut.. Ismaya (2015 : 490) berpendapat bahwa informasi keuangan adalah suatu laporan yang disertai seluruh pelaksanaannya melalui pembuatan neraca dan ikhtisar laba rugi.

Laporan umpan balik digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada realisasi suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari realisasi rencana atau hasil dari sasaran anggaran yang ditetapkan. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan keuangan adalah laporan keuangan berkaitan dengan informasi-informasi lain yang saling berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang ada oleh sistem akuntansi keuangan.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa elemen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Dariana (2019) mengemukakan Laporan keuangan akuntansi pemerintah menggambarkan posisi keuangan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Penyusunan laporan keuangan dilakukan bertujuan menghasilkan laporan keuangan untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan output utama dari proses akuntansi yang dilakukan dalam lingkup pemerintah daerah. Proses ini mengikuti siklus akuntansi yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Herindraningrum (2021). Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai keadaan keuangan dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor.

2.4 Kinerja Keuangan

Noordiatmoko (2020) mengemukakan kinerja keuangan yakni evaluasi mengenai bagaimana sebuah perusahaan mengelola dan menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuannya, serta sejauh mana perusahaan tersebut mematuhi aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Analisis kinerja keuangan biasanya mencakup berbagai aspek untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kesehatan finansial dan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil untuk

meningkatkan kinerja tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan Kinerja tersebut merupakan produk atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan metrik untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Sihombing (2022). Menurut Mulia (2018:15), Kinerja keuangan merupakan ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Dari pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan upaya formal pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan sehingga dapat melihat potensi pertumbuhan dan perkembangan dengan basis sumber daya manusia yang ada.

2.5 Value for Money

Enre (2020), menggambarkan *value for money* Suatu istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai manfaat yang signifikan dari barang dan jasa yang baik, dalam kerangka sumber daya yang tersedia. *Value for money* merupakan konsep manajemen organisasi publik yang didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Menurut Nurafifah (2022), konsep *Value for Money (VFM)* memang mencakup tiga aspek utama yang sangat penting dalam penilaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam sektor publik. Ekonomi mengacu pada penggunaan sumber daya yang efisien untuk menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau boros. Efisiensi berfokus pada pencapaian hasil maksimum dengan input yang minimal. Ini berkaitan dengan cara proses atau kegiatan dilaksanakan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil atau dampak dari suatu program atau kegiatan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Ini berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan dan manfaat yang diperoleh.

1. Tingkat Ekonomi

Menurut Andriani (2019), dalam pengelolaan keuangan, tingkat ekonomi didefinisikan sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomi anggaran dapat diukur dengan membandingkan presentase tingkat pencapaian dengan anggaran belanja. Kriteria tingkat ekonomi ialah sebagai berikut:

- a) Apabila diperoleh nilai dibawah dari 100% berarti ekonomis.
- b) Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis berimbang.
- c) Apabila diperoleh nilai diatas 100% berarti tidak ekonomis.

Perhitungan tingkat ekonomi dapat menggunakan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja. Rumus pengukuran tingkat ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai input}} \times 100\%$$

2. Tingkat Efisiensi

Menurut Andriani (2019), efisiensi mengacupada metode kerja. Suatu proses operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau pekerjaan tertentu menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Menurut Mardiasmo (2019) tingkat efisiensi adalah tingkat masukan suatu organisasi sektor publik relatif terhadap tingkat keluaran sektor publik. Efisiensi dihitung berdasarkan rasio output dan input. Semakin tinggi output dibandingkan dengan input, semakin efisien organisasi tersebut. Pengukuran tingkat efisiensi dapat dilihat dalam kriteria berikut sebagai berikut:

- a) Apabila diperoleh nilai dibawah dari 100% 100% berarti efisien.
- b) Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisien berimbang
- c) Apabila diperoleh nilai diatas 100% berarti tidak efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi dapat menggunakan hasil capaian program kegiatan dibandingkan dengan presentase realisasi anggaran. Oleh karena itu, rumus pengukuran efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{input}} \times 100\%$$

3. Tingkat Efektivitas

Menurut Andriani (2019), Efektivitas merupakan ukuran seberapa sukses suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2019:134) efektivitas terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Keadilan adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Suatu tindakan dikatakan efektif apabila tindakan tersebut mencapai tujuan dan sasaran utama kebijakan tersebut. Semakin besar sumbangan hasil terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula organisasi tersebut. Sementara itu, kriteria tingkat efisiensi ialah sebagai berikut:

- a) Apabila diperoleh nilai dibawah dari 100% berarti efektivitas.
- b) Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang.
- c) Apabila diperoleh nilai diatas 100% berarti tidak efektivitas.

Tingkat efektivitas adalah tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian tentang kinerja keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan konsep *Value for Money*.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 sampai selesai.

3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa sejarah organisasi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta tugas pokok dan fungsi organisasi. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023, laporan realisasi anggaran tahun 2023, dan laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2023.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan meringkas hasil wawancara dan dokumentasi pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.5 Proses Analisis

Tahapan proses yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama mengumpulkan data-data, dokumen dan hasil wawancara yang diperlukan dalam penelitian ini secara langsung dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti laporan realisasi anggaran tahun 2023, laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023, dan laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2023.
2. Tahap kedua melakukan pengelompokan data penelitian seperti laporan realisasi anggaran untuk akan dinilai dari segi ekonomis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta laporan realisasi fisik dan keuangan untuk dinilai dari segi efisien dan efektivitas.

3. Tahap ketiga peneliti melakukan analisis data data yang terkumpul dengan menggunakan metode *value for money* untuk menilai kinerja keuangan lewat ekonomis, efektifitas dan efisiensi.
4. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian kinerja keuangan dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sebagai kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah pada setiap berakhirnya tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara.

Table 1 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

No	Program, Sub Program	Target	Fisik		Keuangan		
			Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100		85,2	706,110,705,07	601,612,940,37	85.2
				0	8	7	0
II	Program Penegelolaan Pendidikan	100		73,3	458,780,100,43	417,357,815,00	73.3
				0	0	9	0
III	Program Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100		95,5			95.5
				6	551,900,300	527,814,122	6

Sumber : Data Olah, 2024

4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang berisi mengenai informasi keuangan pendapatan serta belanja dari suatu entitas atau dari suatu organisasi sektor publik. Pada penelitian ini penulis menggunakan LRA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Uatra Tahun 2023. Berikut tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

Table 2 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN DAERAH	175.000.000	1.175.986.073	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.000.000	1.175.986.073	
Retribusi Daerah	175.000.000	191.250.000	
Lain-lain PAD yang Sah	0	984.734.073	
BELANJA DAERAH	1.165.442.705.808	1.018.890.712	
Belanja Operasi	1.004.923.818.769	879.173.682.858	
Belanja Pegawai	639.720.333.160	590.451.708.605	
Belanja Barang dan Jasa	200.755.516.321	188.214.258.992	
Belanja Hibah	110.447.969.288	100.507.715.261	
BELANJA MODAL	160.518.887.039	139.717.014.854	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.800.199.000	42.151.191.044	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.740.188.039	78.000.491.044	
Belanja Modal Aset Tetap	16.978.500.000	19.565.331.970	S
Surplus/Defisit	1.165.267.705.808	1.165.267.705.808	u m

ber : Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2023

Berdasarkan analisis lewat rasio efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa dilihat dalam uraian berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{574.637.848.903}{1.019.498.569.508} \times 100\% = 56,36\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.165.442.705.808}{1.019.498.569.508} \times 100\% = 87,47\%$$

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Rasio Ekonomis

Table 3 Pengukuran Value for Money Rasio Ekonomis

Program	Input (%)	Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	706,110,705,078	601,612,940,377	85.20
Program Penegelolaan Pendidikan	458,780,100,430	417,357,815,009	73.30
Program Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	551,900,300	527,814,122	95.56
TOTAL	1,165,442,705,808	1,019,498,569,508	87,48

Sumber : Data Olah, 2024

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3 diatas Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan seluruh program kegiatan yakni sebanyak 3 Program. Menurut (Mahsun 2019) dijelaskan bahwa tingkat ekonomis dikategorikan dalam 3 kategori yakni. Jika pengkuran ekonomis di bawah 100% maka dapat di katakan kinerja tersebut ekonomis selanjutnya jika kegiatan tersebut diperoleh sama dengan 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan ekonomis berimbang dan terakhir bila kegiatan tersebut diperoleh diatas 100% maka kegiatan tersebut dikatakan tidak ekonomis. Dengan demikian

kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah ekonomis karena seluruh kegiatan tersebut mendapatkan hasil di bawah 100%.

4.2.2 Rasio Efisiensi

Table 4 Pengukuran *Value for Money* Rasio Efisiensi

NO	Program	Input (%)	Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	85.20	96.36	113
II	Program Penegelolaan Pendidikan	73.30	305	416
III	Program Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	95.56	100	104
Jumlah		110	167	151

Sumber : Data Olah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan 3 program. Selanjutnya Mahsun (2019) menegaskan bahwa pengukuran efisiensi dapat dikategorikan dalam 3 kategori yang pertama jika pengukuran efisiensi mendapatkan nilai di bawah 100% maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan yang kedua jika kegiatan tersebut dinilai dan mendapatkan hasil sama dengan 100% maka kegiatan tersebut dikatakan efisien berimbang dan yang terakhir jika kegiatan mendapatkan nilai lebih dari 100% maka kegiatan tersebut dikatakan tidak efisien. Maka dapat dilihat bahwa pengukuran lewat rasio efisiensi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan hasil tidak efisiensi dimana perhitungannya mendapatkan hasil sebesar 151%. Dimana persentase terbesarnya ada pada Program Penegelolaan Pendidikan yang mencapai 416% hal ini disebabkan karena pada program tersebut memiliki beberapa kegiatan yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sehingga mempengaruhi pengukuran kinerja.

4.2.3 Rasio Efektifitas

Table 5 Pengukuran *Value for Money* Rasio Efisiensi

NO	Program	Output (%)	Outcome (%)	Tingkat Efektivitas (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
II	Program Penegelolaan Pendidikan	100	100	100
III	Program Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	100	100	100
Jumlah		300	300	100

Sumber : Data Olah, 2024

Pada Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan 3 Program. Mahsun (2019) menjelaskan pengukuran kinerja rasio efektifitas dapat dikategorikan dalam 3 yang pertama jika kegiatan yang dilakukan mendapatkan nilai dibawah 100% maka kegiatan tersebut dinilai efektif dan kedua bila suatu program kegiatan dinilai dan mendapatkan nilai sama dengan 100% maka kegiatan tersebut dikatakan efektif berimbang yang terakhir jika kegiatan tersebut mendapatkan nilai lebih dari 100% maka kegiatan tersebut tidak efektif. Dapat dilihat bahwa program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dan mendapatkan hasil efektifitas berimbang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan dari sudut pandang ekonomis, kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik pada pengukuran yang dilakukan lewat elemen ekonomis mendapatkan hasil 65 dari 67 kegiatan tersebut sudah ekonomis atau sebesar 97% dengan kata lain bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah mampu menggunakan anggaran secara tepat sehingga mampu melakukan penghematan biaya.
- 2) Berdasarkan dari sudut pandang efisiensi, kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hal yang kurang baik dimana pengukuran yang telah dilakukan mendapatkan hasil 41 kegiatan dari 67 yang tidak efisien atau sebesar 59%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa program kegiatan yang kurang baik, atau pengelolaan program kegiatan yang tidak tepat diantaranya ada beberapa program yang direalisasi melewati target yang telah di rencanakan hal ini dapat membuat penurunan kinerja dari elemen efisiensi.
- 3) Terakhir berdasarkan sudut pandang elemen efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan efektif berimbang dengan hasil 50% atau 34 dari 67 kegiatan efektif berimbang. Dengan demikian Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu mencapai tujuan yang diharapkan lewat tiap-tiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

5.2. Saran

- 1) Diharapkan dapat mampu mempertahankan kinerja keuangan untuk setiap tahun, sehingga dapat meningkatkan program kegiatan dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan dan dapat meningkatkan nilai nilai ekonomis, efektivitas, serta efisiensi.
- 2) Diharapkan dapat memperhatikan kembali program program kegiatan yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara tepat dan secara maksimal. Khususnya untuk program yang telah direncanakan agar dapat direalisasikan sesuai dengan terget contohnya pada program kegiatan pembangunan laboratorium SMK yang awalnya memiliki target 5 tetapi pada saat realisasi menjadi 48 yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Selanjtnya diharapkan mengkaji kembali program program yang akan dilaksanakan agar setiap program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik sehingga seluruh program kegiatan tersebut bisa berjalan secara efisien.
- 4) Kiranya Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa menggunakan data pada DAPODIK agar dapat menentukan program program kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya.
- 5) Diharapkan dapat mampu menjalankan seluruh program kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini para siswa siswi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2019). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 3(1).
doi:<https://doi.org/10.18860/em.v3i1.2349>
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 77-105.
from <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/132>
- Enre, D. T. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
<http://repository.uinsu.ac.id/9278/>
- Halim, A. 2018. Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. STIM YKPN. Yogyakarta
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(2), 157-171.
doi:<https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Lalita, E. (2022). Tinjauan Alokasi Anggaran Keuangan Daerah Pada Kelurahan Sambau Di Masa Pandemi (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
from <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1348>
- Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta
- Mulyanto, A. (2019). Sistem Informasi konsep dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1(2019), 1-5.
- Mulia Andirfa. 2018. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. Aceh: Unimal Press.
- Nomor, P. P. (8). Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui
- Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 8-14.
doi:<https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>
- Noordiatmoko, D., & Tribuana, I. E. (2020). Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018. *Jurnal Parameter*, 5(4), 38-51.
doi:<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.37>
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
-

Pramudiana. Y. 2018. Sistem Akuntansi Publik. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.

Sihombing, P. A. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
from <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8188>